# PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN PERUSAHAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA DI KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2016



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

**OLEH:** 

SITI ANISA 12340080

PEMBIMBING: NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.

PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2018

#### **ABSTRAK**

Pada Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjelaskan bahwa Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah segala upaya melindungi kepentingan tenaga kerja dalam mewujudkan terjadinya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundangundangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja. Terdapat dua (2) Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk masa Pra Penempatan, Penempatan dan Kepulangan. Pada tahun 2016 di Yogyakarta khususnya di Kabupaten Kulonprogo ada 217 Tenaga Kerja Indonesia yang pergi keluar negeri untuk bekerja sebagai TKI. Kabupaten Kulonprogo menempati peringkat paling tinggi sebagai peminat warga untuk pergi keluar negeri untuk menjadi TKI. Hal ini menarik Penyusun untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS Kabupaten Kulonprogo dan apakah sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penempatan oleh Pemerintah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan *yuridis empiris* sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik, dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara, daftar pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta dua PPTKIS PT Persada Duta Utama dan PT Dharmakarya Raharja di Kabupaten Kulonprogo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PPTKIS bertanggung jawab atas masa Pra Penempatan, Penempatan dan juga masa kepulangan. Di Kabupaten Kulonprogo ada dua PPTKIS yang resmi yaitu PT Persada Duta Utama dan PT Dharmakarya Raharja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melayani para Pekerja Migran untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar untuk bekerja di Luar Negeri. Permasalahan yang timbul yang terjadi pada para Tenaga Kerja Indonesia karena kurangnya informasi dan pengetahuan yang mendasar mengakibatkan para Tenaga Kerja Indonesia mendapatkan masalah diantarnya pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Penyikapi hal tersebut PT yang mengantar para TKI untuk lebih mengarahkan lagi akan bekerja seperti apa dan bagaimana memberikan penjelasan yang lebih detail lagi kepada para CTKI.

**kata kunci :** Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi, PPTKIS, Undang-undang No 39 Tahun 2004 dan Peraturan pemerintah No 4 Tahun 2013



# KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

# FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp(0274) 512840 Yogyakarta

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Siti Anisa

Nim

:12340080

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul " Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perusahaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016" merupakan hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Mei 2018

Penulis

LAMIN /~

Siti Anisa

12340080



# KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA **YOGYAKARTA**

#### FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp(0274) 512840 Yogyakarta

# SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama

: Siti Anisa

Nim

: 12340080

Judul Skripsi :Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2016

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.sebagai salah satu syarat untuk meperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2018

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Pembimbing

Ag. M.Hum Dr. Lindra Dar

19790105 200**5**01 2 003

Nur'ainun Mangunsong, S.H. M.hum

19751010 200501 2 005



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

#### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-2120 /Un.02/DS/PP.00.9/08/2018

Tugas Akhir dengan judul: PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN PERUSAHAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2016

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Siti Anisa Nomor Induk Mahasiswa : 12340080

Telah diujikan pada : jum'at, 8 Juni 2018

Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Iswantoro, §.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II

Faisal Lugman Hakim, S.H., M.Hum. NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

RIFAKultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

r H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

19710430 199503 1 001

#### HALAMAN MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Al-Baqarah: 286)

"Kebahagiaan kita sendiri yang ciptakan, menebar kebaikan dan kebahagiaan salah satu wujud meringankan beban, diri sendiri maupun orang lain dan berfikir positif adalah cara yang ampuh untuk menyembuhkan luka"

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

#### HALAMAN PERSEMBAHAN

# Dengan mengharap Ridha Allah SWT, karya ini saya persembahkan untuk :

- 1. Kedua orang tuaku, Mama dan Mimi tersayang, yang selama ini dengan penuh kasih sayang dan do'anya selalu memberikan saya yang terbaik dan menjadikan saya pribadi yang baik, juga cinta kasih yang tak ternilai. Yang memotivasi saya sehingga saya selalu punya kekuatan untuk terus berjuang, serta adik-adikku Ahmad Musta'in, M. Rizki Ari Sandi, Syaifudin Zuhri, NAzwa Bliqis, yang selalu saya sayangi semoga kelak kalian akan menjadi orang besar dan terimakasih atas semua dukungan selama ini.
- 2. Untuk keluarga besarku, yang ada di Sumatera Selatan maupun yang di Cirebon terimakasih banyak karena sudah memberikan saya dukungan serta kasih sayangnya untuk saya, untuk uyutku semoga uyut panjang umur dan selalu menmotivasi saya untuk selalu baik kepada orang lain.
- 3. Teman-teman seperjuangan, Ilmu Hukum angkatan 2012.
- 4. Teman-teman KKN angkatan 93 pedukuhan Putat, pak Fauzi, Pilo, Sulaiman, Mu'az, Ce Dian, Kak Rosa, Ce ida, Ce Poo. terimaksih sudah memberikan pelajaran hidup selama kurang lebih dua bulan, dan memberikan pengalaman yang berharga juga adik-adik dukuh Putat yang senantiasa memberikan kehangatan kepada saya selama ini.
- 5. Untuk Fajar Nurvia terimakasih selama ini sudah memberikan saya dukungan serta motivasi untuk mengerjakan skripsi ini.

- 6. Sahabat-sahabatku tersayang, yang selalu memberikan saya kekuatan dan dukungan, serta memberikan saya solusi atas apa yang saya rasakan, untuk Desi Trisna terimakasih sudah menjadi adik juga kakak yang baik, juga teman-teman Sumo Squid yang telah menerima saya dengan baik, untuk Mbak Husnul dan Mbak Nunung terimakasih sudah selalu mengajak saya untuk tetap bertahan melanjutkan skripsi saya sampai pada kelulusan ini, dan masih banyak lagi saya ucapkan banyak terimakasih karena sudah banyak mendukung saya, memberikan dorongan serta motivasi.
- Juga terimaksih untuk Minarsih, Dina Oktaviani, Ayu Mei Triana, Siti Maryam juga Juraida yang sudah menjadi sahabat yang baik.
- 8. Untuk Teman-teman seperjuangan IH, Nurfaizah Pratiwi, Esa Nuraisyah, Moh Singgih, M Fredico yang sangat luar biasa memberikan saya banyak sekali dukungan untuk selalu melanjutkan dukungan untuk mengerjakan skripsi ini
- Terakhir terimaksih kepada teman-teman seperjuangan Bliss Pool &
  Lounge yang telah menerima saya dengan sangat baik juga kepada bapak
  Ir. Roni Handoko yang sudah sangat baik menerima saya.

#### KATA PENGANTAR

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد شه رب العالمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين. اشهد ان لا الله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على الله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan nikmat Iman, Islam dan Ihsan, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS Kabupaten Kulonprogo Tahun 2017", sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW karenanya Penyusun dapat merasakan Indahnya Islam.

Terselesaikannya penyusun skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan motovasi dari banyak pihak yang senantiasa dengan sabar dan tulus serta ikhlas. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penyusun menyampaikan banyak terimakasih ter hadap:

- Bapak Prof, Drs. Yudian Wahyudi, M.A,. Ph.D selaku Sektor Universitas
   Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Bapak Dr, H, Agus Moh NAjib. M,Ag. Selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Ibu Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M.Hum Dan Bapak Faisal Lukman hakim,
   S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekertaris
   Prigram Studi Ilmu Hukum.

- 4. Bapak Drs. Makrus M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik
- 5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah secara ikhlas meluangkan waktu untuk dapat memberikan arahan dan membagi ilmunya selama penyusunan skripsi ini.
- 6. Seluruh staf pengajar serta dosen Program studi Ilmu hokum yang telah mengenalkan, membekali, membimbing atau memberikan ilmunya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat penyelesaikan pendidikan di program Ilmu Hukum.
- 7. Ibu Tati selaku Tata usaha Program Ilmu Hukum yang dengan sabar dan telaten membantu penyusun dalam menyelesaikan administrasinya.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS ( PT Persada Duta Utama dan PT Dharmakarya Raharja) Kabupaten Kulonprogo. Terimakasih telah memberikan informasi dan pendampingan dalam menyusun skripsi ini.
- 9. Mama Dasuki dan Mimi Rukayah terimakasih banyak telah memberikan saya banyak sekali dukungan dan do'anya.
- 10. Untuk adik-adikku kalian adalah penghibur dalam kesuntukaknku, terimaksih sudah memberikan yang terbaik untuk kakakmu yang selalu bawel dan manja dan ingin selalu cepat pulang.
- 11. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2012 yang sudah lulus terimakasih sudah memotivasi saya untuk terus berjuang.
- 12. Teman-teman Pejuang Skripsi yang selalu memberikan dukungannya.
  Semoga kita selalu bisa bersilaturahmi setelah kelulusan ini.

- 13. Teman-teman KKN yang selalu memberikan keindahan dalam perjumpaan. Kebaikan dan kekuatan untuk mengerjakan skripsi ini.
- 14. Teman-teman Bliss Pool dan Teman-teman Sumo Squid serta Teman-teman Sumo Sushi Bar terimaksih sudah memberikan banyak pelajaran yang berhrga selama ini.
- 15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi ini baik yang terlibat maupun yang tidak secara langsung.

Semoga ALLAH SWT senantiasa membalas segala kebaikan atas ketulusan yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa penyusunan skripsi ini banyak sekali kekurangan baik dari segi substasi maupun penulisan. Maka dari itu penyusun dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk bisa menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta, 28 Mei 2018 Penyusun

STATE ISLAM Siti Anisa 12340080

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PESEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teorietik	10
G. Metode penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA	
DAN PERLINDUNGAN	
A. Ruang Lingkup Tenaga Kerja	
1. Pengertian Tenaga Kerja	24
2. Macam-macan Tenaga Kerja	25
3. Peraturan Tentang Tenaga Kerja	26
4. Hukum Ketenagakerjaan	27

		5. Dasar Hukum Ketenagakerjaan					
		6. Sumber Hukum Ketenagakerjaan					
	B.	Tenaga Kerja Indonesia					
		1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia					
		2. Tata cara proses penyaluran Tenaga Kerja dari Pra Penempatan					
		Penempatan sampai Kepulangan34					
	C.	Hak dan kewajiban TKI					
		1. Hak TKI dalam undang-undang No 39 Tahun 200442					
		2. Hak atas jaminan Hukum dan Keadilan43					
	3. Hak dan Kewajiban TKi dalam Perjanjian Penempatan						
		4. Hak dan Kewajiban TKI dalam Perjanjian kerja46					
	<ul><li>D. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia</li><li>1. Kewajiban Negara Memberikan Perlindungan Terhadap</li></ul>						
		2. Perlindungan Terhadap TKI melalui Asuransi					
		3. Perlindungan Buruh Migran terhadap Konverensi 199049					
		4. Perlindungan TKI berdasarkan Pernyataan Umum tentang Hak					
		asasi Manusia50					
		5. Perlindungan TKI berdasarkan Undang-undang No 39 Tahun					
		200451					
DADII	I D.	INAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
DAD II.		ERTA PPTKIS					
	C	Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Kulonprogo					
	11.	1. Dasar Hukum53					
		Tugas dan Fungsi Dinas tenaga Kerja dan transmigrasi					
		3. Struktur Organisasi					
		4. Sumber Daya Aparatur Kabupaten Kulonprogo					
		5. Visi dan misi					
	B	B. Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)					
	٠.	Surat Ijin Pengesahan dan Pelaksanaan Penempatan					
		Tenaga Kerja Indonesia Swasta61					
		1011454 1201Ju 11140110014 D Wabid					

	2.	Tanggung jawab PPTKIS yang berkaitan dengan Perlindungan							
		TKI							62
	3.	Sangsi t	erhadap P	PTKIS yan	g melangg	ar atura	n		63
	4. Hak dan Kewajiban PPTKIS								63
	5.	Penyele	saian Mas	alah					64
	6.	Pelaksa	naan Pene	mpatan Ter	aga Kerja	Indone	sia Swa	sta	66
BAB IV	PF	ELAKSA	NAAN	PENEN	<b>IPATAN</b>	P	ERLIN	DUNGA	٩N
	TI	ENAGA	KERJA	INDONE	SIA OL	EH D	INAS	TENAC	ЗA
	Kl	ERJA D	AN TRAI	NSMIGRA	SI, DAN	PPTK	IS KAF	BUPATI	EN
	K	ULONPI	ROGO						
	A.	Ketidak	sesuaian F	Perjanjian da	an Pelaksa	naan Pe	enempat	an di	
		Luar Ne	egeri						68
	B.	Perlindu	ıngan Ten	aga Kerja I	ndonesia s	udah se	suai		
		dengan	Perundang	g-undangan	yang berla	aku			74
BAB V	PEN	NUTUP							
	A.	KESIMP	ULAN						79
	B.	SARAN							80
DAFTAI	R PU	STAKA	.ISLAA	ALC. LL	MIMER	SIT	<b>/</b>		82
LAMPIR	AN-I	LAMPIR.	AN						
CURICU	LUM	VITAE							

#### **BABI**

# **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Pekerja migran merupakan sebutan bagi masyarakat yang bekerja di luar negara asalnya. Negara yang masuk dalam kategori dunia ketiga seperti Indonesia, memang belum memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk memberikan jaminan kehidupan yang layak dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang mencukupi. Biasanya kita memberi sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau untuk yang lebih spesifik Tenaga Kerja Wanita (TKW) karena memang lapangan kerja bagi kaum perempuan lebih besar peluangnya untuk direkrut di sektor informal khususnya pekerja rumah tangga. Keberadaan mereka sering menjadi bahan pemberitaan media massa terkait perlakuan buruk yang mereka terima di luar negeri. Meski tidak semua buruh migran mengalami hal yang sama, namun tidak dipungkiri, sebagian besar masih berada dalam situasi rentan karena rendahnya perlindungan dan jaminan keamanan di negeri tujuan. 1

Pekerja Migran ialah pekerja yang bekerja luar dari tempat asalnya, baik dalam ataupun luar negara. Menurut Konvensien PBB mengenai Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka, Pekerja Migran ialah orang yang membuat aktivitas berbayar di negara yang bukan negara asalnya.

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> http://bengkeltulis-saddamcahyo.blogspot.co.id/2014/06/makalah-problematika-pekerja-migran.html, akses 12 mei 2018.

Pada prinsipnya hukum kerja adalah "serangkaian peraturan yang mengatur segala kejadian yang berkaitan dengan bekerjanya seseorang pada orang lain dengan menerima upah."Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2)<sup>2</sup> menetapkan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaann dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Dari Pasal tersebut, jelas dikehendaki agar semua warga negara yang mau dan mampu bekerja supaya diberikan pekerjaan, sekaligus dengan pekerjaan tersebut agar mereka dapat hidup layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum.

Salah satu upaya yang selama ini dianggap efektif untuk mengatasi masalah penduduk adalah melaksanakan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri melalui kerja antar negara. Pengiriman tersebut setidaktidaknya telah mendatangkan manfaat yang besar, yaitu:

- Mempererat hubungan antar negara (negara pengirim dan negara penerima).
- 2. Mendorong terjadinya pengalaman Kerja dan ahli teknologi.
- Meningkatkan pembayaran di dalam neraca pembayaran negara (devisa).

Selain membawa dampak positif seperti yang dikemukakan di atas, ternyata dalam praktek penyelenggaraannya timbul beberapa dampak negatif seperti adanya tindakan-tindakan di luar batas keprikemanusiaan yang menimpa para tenaga kerja. Terjadi tindakan-tindakan di luar batas

2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaann dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

perkemanusiaan itu jelas merugikan tenaga kerja Indonesia sendiri secara individual dan dapat merusak citra bangsa Indonesia sehingga tidak mengherankan akan timbul "suara-suara" yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan program antarkerja antarnegara ini.

Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia mendorong jumlah TKI yang mengadu nasib ke berbagai negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan bekerja di luar negeri mengalahkan gambaran tentang kekerasan, eksploitasi, dan kebijakan deportasi terhadap TKI. Bahkan hal itu akan tetap dilakukan meskipun harus pergi dengan status tak berdokumen.

Sementara itu, selain berhak memperoleh pekerjaan, Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia lebih menegaskan lagi bahwa warga negara juga berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya. Oleh karena itu, warga negara tidak dapat dilarang untuk bekerja dimana saja, termasuk di luar negeri. Di samping faktor penarik yang ada di luar negeri berupa upah yang lebih tinggi, maka faktor yang paling berpengaruh adalah faktor pendorong yang ada di dalam negeri, yaitu belum terpenuhinya salah satu hak dasar warga negara yang paling penting yaitu: pekerjaan, seperti diamanatkan di dalam Pasal 27 D ayat (2) UUD 1945. Adanya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mendorong pemerintah untuk membuat aturan yang berguna untuk melindungi para Tenaga Kerja Indonesia. Diundangkannya Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar

Negeri diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi para Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Luar Negeri. Selain itu adanya Permennakertrans No. 14/Men/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia juga merupakan landasan hukum untuk melindungi TKI yang berada di luar negeri. Dalam rangka perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan TKI, telah dilaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) bagi PPTKIS yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri serta peraturan-peraturan lainnya terkait penempatan dan perlindungan TKI.

Secara umum, pelanggaran yang banyak dilakukan PPTKIS yang dicabut izinnya itu adalah memiliki sarana dan prasarana penampungan TKI yang tidak layak, misalnya tempat tidur atau kamar mandi yang tidak memadai. Selain itu, pelanggaran yang sering dilakukan adalah pemalsuan sertifikat pelatihan TKI yang seharusnya sesuai peraturan yang ada, begitu juga pemalsuan umur calon TKI, Kemenaker terus melakukan pembenahan terhadap sistem penempatan dan perlindungan TKI dengan mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja

(Permenaker) No.22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Permanaker tersebut memberikan aturan ketat terhadap PPTKIS. "Salah satu poin penting dalam aturan baru ini adalah ditetapkan blacklist selama lima Tahun terhadap penanggung jawab PPTKIS yang sudah dicabut SIUPnya karena melakukan pelanggaran berat.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjelaskan bahwa Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah segala upaya melindungi kepentingan tenaga kerja dalam mewujudkan terjadinya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja. Perlu adanya jaminan tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas yang sebesar-besarnya.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tingginya minat masyarakat untuk menjadi TKI juga terjadi, khususnya di Kabupaten Kulonprogo. Pada Tahun 2016 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tercatat 217 orang ditempatkan bekerja di luar negeri. Keadaan ekonomi yang relatif rendah mendorong masyarakat di daerah tersebut memiliki minat yang tinggi untuk menjadi TKI di luar negeri<sup>3</sup>. Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Nakertrans) dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maguwoharjo, akses 09 mei 2018

Sehubungan dengan hal tersebut, Nakertrans melakukan kerjasama dengan PPTKIS untuk melakukan pengiriman TKI ke Luar Negeri. Di Kulonprogo terdapat beberapa PPTKIS yang melakukan kerjasama dengan Nakertrans. Salah satu PPTKIS yang bekerjasama dengan Nakertrans Kulonprogo yaitu PT Persada Duta Utama. Dan PT Dharmakarya Raharja. PT Persada Duta Utama dan PT Dharmakarya Raharja merupakan suatu perusahaan yang menangani masalah calon TKI di Kabupaten Kulonprogo. PT Persada Duta Utama dan PT Dharmakarya Raharja bertanggung jawab atas masa pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan masa setelah penempatan calon TKI.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan diantaranya sebagai berikut:

- Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS Kabupaten Kulonprogo?
- 2. Apakah Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan PPTKIS sudah sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2013?

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mengetahui pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas
   Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan PPTKIS terhadap Tenaga Kerja
   Indonesia di Kabupaten Kulonprogo.
- Tata cara pelaksanaan proses penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Kulonprogo.
- 3. Mendeskripsikan upaya perlindungan TKI di Kabupaten Kulonprogo.

#### D. Kegunaan Penelitian:

#### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah khasanah pengetahuan, dan memberikan kegunaan untuk pengembangan Ilmu Hukum yang merupakan salah satu rumpun dari Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya Hukum Ketenagakerjaan. Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya yang sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Bermanfaat untuk mengembangkan penalaran dan menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah Pendidikan

Kewarganegaraan dan Hukum dan sebagai bekal untuk menjadi guru yang profesional.

b. Bagi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulonprogo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bahan pertimbangan atau bagi Dinsosnakertrans dalam rangka menetapkan kebijakan - kebijakan yang mengatur tentang perlindungan TKI khususnya di Kulonprogo.

# c. Bagi PTKIS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi PTKIS dalam rangka memberikan pelayanan bagi para calon TKI.

#### E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun literatur yang didalamnya membahas tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI oleh Dinas Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Kulonprogo. Skripsi yang ditulis oleh Lutfiati Rohimah yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja di Luar Negeri menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" yang membahas tentang hukum islam belum memberikan konsep yang ututh berupa ketentuan-ketentuan secara rinci mengenai bagaimana prosedur

penempatan dan perlindungan hak-hak TKI dilaksanakan, hukum islam hanya bersikap fakultatif (hukum yang mengatur atau melengkapi) pelaksanaannya berdasarkan perjanjian kerja. 4 Skripsi yang ditulis oleh Wisnu Kawiryan yang berjudul "Perlindungan TKI di Luar Negeri oleh BP3KI Yogyakarta, Pada Masa Pra Penempatan" yang membahas tentang bentuk perlindungan yang dilaksanakan oleh BP3KI pada masa pra penempatan meliputi: sosialisasi PTKLN, pengurusan dan verifikasi dokumen tenaga kerja diluar negeri, memberikan pembekalan sebelum pemberangkatan berkoordinasi dengan PPTKIS juga mengalami pengaduan tentang masalah yang dihadapi TKI.<sup>5</sup> Adapun skruipsi yang ditulis oleh Mahendra Handoko yang berjudul "Ketentuan Pidana didalam Undang-Undang no 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri<sup>116</sup> dan skripsi yang ditulis oleh Rashit Imany pada Tahun 2009 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terminate Tenaga Kerja Indonesia Wanita pada PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindo Kabupaten Trenggalek". 7

SUNAN KALIJAGA

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Lutfiah Rohimah, "Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum slam", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakart, (2012).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Wisnu Karwiyan, "Perlindungan TKI di Luar Negeri Oleh BP3KI Yogyakarta pada Masa Pra Penempatan", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Mahendra Handoko, "Ketentuan Pidana didalam Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Rashif Imany. "Tinjauan Hukum Inslam Terhadap Terminate Tenaga Kerja Indonesia Wanita pada PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindo Kabupaten Trenggalek," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2009).

#### F. Kerangka Teoretik

Adapun beberapa teori yang menjadi pijakan peneliti dalam melakukan penelitiannya ialah sebagai berikut:

# 1. Teori Negara Hukum

Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya bahwa "penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah nomoi" Konsep negara hukum Eropa Kontinental Rechtstaatdi pelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok yaitu : (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, (2) negara didasarkan pada teori trias politika, (3) pemerintah diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang, (4) ada Pengadilan Administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechmatige overheidsdaad)<sup>8</sup> Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Titik Triwulan T, dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* Indonesia, (jakarta: kencana 2011), hlm, 267

2000 tentang Pengadilan HAM)<sup>9</sup>. Dengan HAM ini pemerintah bisa melindungi warganya baik dalm negeri maupun luar negeri. Karena HAM menjangkau secara luas, sudah banyak peran HAM dalam mengatasi berbagai masalah kemanusian di Indonesia. Mulai dari kasus pemulung sampai kasus TKI di bahas olek Komnas HAM. Perlindungan terhadap TKI Presiden Republik Indonesia Menimbang. Pertama, bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Kedua, bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Ketiga, bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Keempat, bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia. Kelima, bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan

<sup>9</sup>Tulisan tentang Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli, 10 November 2010, akses 09 mei 2018.

hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Perlindungan terhadap tenaga kerja, sudah jelas bahwa para TKI menjadi tanggung jawab dan dibawah naungan Negara. Apabila terjadi satu dua hal maka Negara wajib mengambil tindakan yang tegas untuk membantu TKI tersebut menyelesaikan masalahnya, karena hal ini memang secara resmi termaktub langsung dalam UU oleh Presiden Republik Indonesia.

#### 2. Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dinyatakan bahwa "Pemerintah bertugas mengatur, Membina, Melaksanakan, dan Mengawasi Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri." Dan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur tentang penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang

 $^{10}\ http://www.gerakanantitrafficking.com/$  , akses 09 mei 2018

mempunyai peraturan perUndang-Undangan yang melindungi tenaga kerja asing, oleh sebab itu setiap orang dilarang mnempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat kerja yang bertentangan dengan nilainilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perUndang-Undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, maka semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan TKI. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 memberikan definisi yuridis "Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. 11 Dalam melakukan perlindungan terhadap TKI, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban:

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri.
- b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139*, akses 09 mei 2018.

- c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri.
- d. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan.
- e. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri dimulai dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan ketika pulang ke tanah air. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan

#### 3. Teori Kewenangan

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk

mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten complex) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "bevoegheid" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "bevoegheid". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "bevoegheid" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan 12

- 1. With atribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.
- 2. Delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the

16

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, (Nijmegen: Ars Aeguilibri, 1998), hlm. 16-17

- delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.
- 3. With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.
- J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ pemerintahan atau Lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan Legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) Pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin

dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Delegasi harus definitif, artinya delegasn tidak dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- 2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perUndang-Undangan.
- 3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepagawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- 4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- 5. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan

mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar<sup>13</sup>.

#### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitin ini merupakan penelitian *deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan serta memberi data sedetail mungkin mengenai permasalahan yang diteliti.

#### a. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS Kulonprogo Yogyakarta.

#### 2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan, dalam hal ini mengacu pada literature, perUndang-Undangan, serta data lain yang relevan dengan penelitian ini yang kemudian dibedakan menjadi:

## a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perUndang-Undangan.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 219.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti jurnal, dan penelitian tentang Pelaksanaan Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS di Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder.

# 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakanpen dekatan *Yuridis-Empiris*.

Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Tenaga kerja Indonesia dan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penempatan Tenaga kerja Indonesia oleh Pemerintah.

#### 3. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau sebuah permasalahan dengan melalui kegiatan analisi data penelitian.<sup>14</sup> *Deskriptif* berarti mendeskriptifkan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan yang saat ini berlaku sebagai hokum positif.<sup>15</sup> Sedangkan analisis berarti menjelaskan lebih mendalam daripada sekedar *deskriptif*,<sup>16</sup>

# 4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu suatu secara memperoleh informasi langsung dan aktifitas yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan menggunakan pedoman wawancara sebagai pemandunya.
- b. Studi Pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas.
- c. Dokumentasi, yaitu sesuatu yang di peroleh dengan cara mengambil gambar atau surat-surat yang berkaitan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan PPTKIS Kabupaten Kulonprogo

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode *diskriptif kualitatif* yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal apa saja yang dapat

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Soerjobo Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum normative*, *Suatu Tinjauan Singka*, (Jakarta: Rajawali, 1998), Cet. Ke-2, hlm. 14-15

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Dilengkapi *Tata Cara Contoh Penulisan Karya Ilmian Bidang Hukum*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2012), hlm. 229.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Huklum,* (Jakarta: UI Press, 1986), Cet.Ke-3, hlm. 7.

dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan PPTKIS Kulonprogo.

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang Tinjauan umum tentang Tenaga Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Kabupaten Kulonprogo dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Kulonprogo serta PPTKIS Kabupaten Kulonprogo, Fungsi, Tugas, visi dan misi, Kedudukan, tata struktur serta Mekanisme Pelaksanaan Perlindungan Dinsosnakertrans dan PPTKIS dikabupaten Kulonprogo

Bab keempat berisi tentang analisa tentang Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PTKIS Kulonprogo apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2013.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran penelitian yang mungkin belum tercantum atau terlewatkan dalam penelitian ini



## **BAB V**

## **PENUTUP**

## 1. Kesimpulan

a. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh PPTKIS

Pelaksanaan Penempatan yang di lakukan oleh PPTKIS sudah cukup maksimal untuk para TKI yang ingin bekerja di Luar Negeri. Penempatan yang di sediakan oleh PPTKIS dapat di pertanggung jawabkan oleh PPTKIS tersebut. Di Kulonprogo sendiri terdapat dua PPTKIS yang resmi dan pelayanan yang diberikan oleh kedua PPTKIS tersebut sudah maksimal dan menjamin kehidupan para TKI di masa yang akan datang.

 b. Ketidaksesuaian Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Oleh PPTKIS

Ketidaksesuaian yang penulis temukan adanya para TKI yang pulang ke Indonesia tidak di antar ataupun di jemput oleh PPTKIS, seharusnya PPTKIS bertanggung jawab atas kepulangan para TKI. Pada masa Pra Penempatan sampai Penempatan, PPTKIS melaksanakan Tugas dan Hak yang telah di tentukan oleh Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 20013 namun pada masa kepulangan TKI berinisiatif untuk pulang ke Tanah air dengan Kepulangan Mandiri. Sebagai Warga Negara Indonesia, kita tentunya sangat menginginkan hidup yang layak dan aman serta

damai, oleh karena itu banyak sekali para Warga Negara Indonesia memilih untuk bekerja di Luar Negeri karena terlalu sempitnya lapangan Pekerjaan yang ada di dalam negerinya sendiri juga banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhinya sehari-hari, tak heran jika para warga negara berbondong-bondong untuk pergi ke luar negeri. Namun ada baiknya kita sebagai warga negara yang baik harus menghormati nama negara kita sendiri yaitu Indonesia dengan berbuat yang baik di negara orang lain. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak bisa melarang siapa saja yang telah memenuhi syarat untuk pergi keluar negeri, PPTKIS yang bersangkutan tidak bisa melarang siapapun untuk pergi bekerja diluar negeri, yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah bagaimana melaksanakan Peraturan yang baik untuk kemajuan para Tenaga kerja Indonesia. Perlindungan yang diberikan Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS sudah sangat baik bagi Para Tenaga Kerja Indonesia, maka para Tenaga Kerja Indonesia harus bisa memanfaatkan apa yang sudah diberikan Pemerintah untuk Kepentingan para Tenaga Kerja Indonesia.

## 2. Saran

Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar selalu melakukan yang terbaik untuk perlindungan Tenaga Kerja Indonesia agar para TKI tidak mendapatkan kesalahan informasi atau menyesal dikemudian hari karena tidak mengikuti informasi. untuk PT Persada Duta Utama diharapkan untuk terus melakukan tugas-tugas yang baik agar para Tenaga Kerja Indonesia

tidak kecewa dengan PT Persada Duta Utama dan memilih cara Ilegal. Untuk PT Dharmakarya Raharja agar dapat memastikan Tenaga Kerja Indonesia akan bekerja dimana dan dalam posisi seperti apa agar tidak terjadi kesalah pahaman yang berakibat fatal.

Dan untuk para TKI agar selalu melindungi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga harus selalu bertanya jika tidak jelas juga harus mengikuti semua proses yang telah disediakan agar diemudian hari tidak menyesal.



## **DAFTAR PUSTAKA**

## A. Dari PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja.

Permennakertrans Nomor 14/Men/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

## B. Dari Buku, Jurnal

Manulang, Sendjun H, *pokok pokok hukum ketenagakerjaan*, jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Pemburuhan di Indonesia*. di menerbitkan PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.1995.

J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, (Nijmegen: Ars Aeguilibri, 1998), h. 16-17.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, suatu *Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, Cet. Ke-2, 1998.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm, 10-11.

F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 219.

Soekamto, Soerjono, *pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 2007.

Mahendra Handoko, "Ketentuan Pidana didalam Undang-Undang no 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

Rashif Imany. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terminate Tenaga Kerja Indonesia Wanita pada PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindo Kabupaten Trenggalek," Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2009).

Titik Triwulan T, dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, (jakarta: kencana 2011), hlm, 267.

Lutfiah Rohimah, "Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum slam", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakart, (2012).

Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 82.

Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 106.

Wisnu Karwiyan, "Perlindungan TKI di Luar Negeri Oleh BP3KI Yogyakarta pada Masa Pra Penempatan", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

## C. Lain-lain

http://www.bnp2tki.go.id/read/9511/Jumlah-TKI-Asal-Jabar-Terbanyak-Dibandingkan-Daerah-Lain.html

Sumber aplikasi *ktkln-bnp2tki* diperoleh dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maguwoharjo Yogyakarta pada tanggal 20 november 2017 www.harianjogja.com/baca/2009/07/10/tki-informal-ke-malaysia-dihentikan

http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2011/01/teori-kewenangan.html http://bengkeltulis-saddamcahyo.blogspot.co.id/2014/06/makalah-problematika-pekerja-migran.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga\_kerja#Berdasarkan\_penduduknya
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\_Nasional\_Penempatan\_dan\_Perlindun
gan\_Tenaga\_Kerja\_Indonesia

https://insertpoin.blogspot.co.id/2016/05/makalah-perlindungan-hukumterhadap.html

Pusat sumber daya buruh migran, rujukan informasi Tenaga Kerja Indonesia., dikutip pada tanggal 20 Desember 2017 http://www.lpkkorindo.com/2012/07/apa-itu-pptkismari-mengenal-lebih-jauh.html

Subbag Umum dan Kepegawaian Disnakertrans KP



# Wawancara dengan Bapak Susilo, Bapak Amry dan Bapak Agus

Bapak Amry



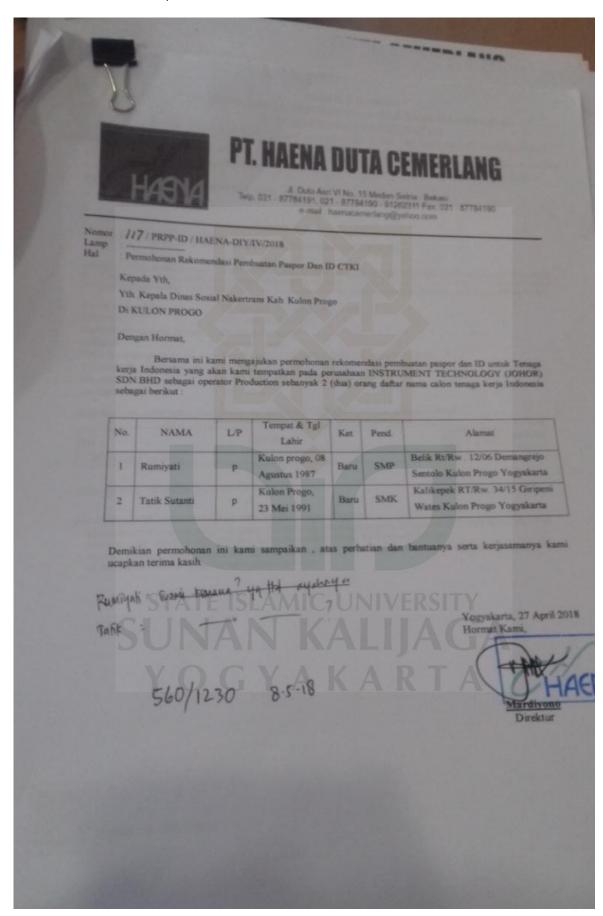




Bapak Susilo



# STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



# **BADAN NASIONAL** PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA **DEPUTI BIDANG PENEMPATAN**

Jalan MT. Haryono Kav. 52 Gedung A Jakarta Selatan - 12770, Telp.: (921) 7981295 Fax (921) 7981295 PO BOX 4451 JKTS, Website: www.bnp2tkl.go.id

B. 160/SIP-00/PEN-P2P/IV/2018

Jakarta, 04 April 2018

SURAT IZIN PENGERAHAN (SIP)

Kepada Yth. Direktur Utama PT. HAENA DUTA CEMERLANG JL. DUKUH VI NO.45 RT.008/002 KEL.DUKUH KEC. KRAMAT JATI, JAKTIM

Menunjuk surat saudara nomor: 005/SIP/HDC-JOG/IV/2018, tanggal 02 April 2018 tentang Permohonan Penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP) dan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Surat Izin Pengerahan (SIP) dan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 378 Tahun 2014, maka: Ketenagakerjaan nomor: 22 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 378 Tahun 2014, maka:

: PT. HAENA DUTA CEMERLANG Nama Perusahaan

: KEP.348/MEN/X/2009 Nama Penanggung Jawab : DEDE BAHRUDIN : Direktur Utama

: INSTRUMENT TECHNOLOGY (JOHOR) SON BHD Jabatan No. dan Tgl. Legalisasi JO : A-6083/KONS-JB/I/2018 tanggal 29 Januari 2018

: MALAYSIA Negara Tujuan : 100 orang Jumlah Permintaan

Diberikan izin untuk melakukan perekrutan di Provinsi DI YOGYAKARTA, sebagai berikut :

Diberikan izin untuk melakukan	perekidianan	Jenis Kelamin L P L&P Jumlah
No	Jabatan	0 16 0 16
1 Production Operator		

Masa Berlaku: 04-04-2018 s.d. 04-10-2018

 Melakukan pengurusan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi DI YOGYAKARTA untuk

 Melakukan pengurusan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi DI YOGYAKARTA untuk

 Melakukan pengurusan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi DI YOGYAKARTA untuk

 Melakukan pengurusan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi DI YOGYAKARTA untuk

 Melakukan pengurusan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi DI YOGYAKARTA untuk

 Melakukan pengurusan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi DI YOGYAKARTA untuk

 Melakukan pengurusan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi DI YOGYAKARTA untuk

 Melakukan pengurusan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi DI YOGYAKARTA untuk

 Melakukan pengurusan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi DI YOGYAKARTA untuk

 Melakukan pengurusan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi DI YOGYAKARTA untuk

 Melakukan pengurusan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi DI YOGYAKARTA untuk

 Melakukan pengurusan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi DI YOGYAKARTA untuk

 Melakukan pengurusan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi DI YOGYAKARTA untuk

 Melakukan pengurusan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi DI YOGYAKARTA untuk

 Melakukan pengurusan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi DI YOGYAKARTA untuk

 Melakukan pengurusan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi DI YOGYAKARTA untuk

 Melakukan pengurusan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi DI YOGYAKARTA untuk

 Melakukan pengurusan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi DI YOGYAKARTA untuk

 Melakukan pengurusan ke Dinas yang membidangi ke Dinas yang Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan dimaksud, agar Saudara :/

mendapatkan alokasi Calon TKI dan Surat Pengantar Rekrut ke Kabupaten/Kota 2. Memperpanjang masa berlaku SIP apabila kebutuhan Calon TKI belum terpenuhi dan jangka waktu Job

Order/Demand Letter/Visa Wakalah masih berlaku

		e in connec			
Nomor Lampirar Perihal	028/SPR/HDC-JO 1 (satu) berkas Permohonan Per				09 April 2
Di tempa	t Control of the cont				
Berdasar April 201 wilayah r	kan pengesahan Sur I8 bersama ini kami n ekrut sebagaimana ri	ncian sebagai ben	lkut:	or : B, 1	60/SIP-00/PEN-P2P/IV/2018 tang kan Surat Pengantar Rekrut (SPR
NO	Jabatan	Jenis	Kelamin	L&P	
7 Pro	duction Operator	Ö	16	0	16
		Kota terrobut di bi	awah ini:		
Dapat dir	rekrut di Kabupaten/ I	VOTA TELBEDOL OLD		5	SLEMAN YOGYAKARTA
1 BA	NTUL INUNG KIDUL			6	YOGYAKARIA
2 100	LONPROGO			-	
3 KU					
4 SL	EMAN	ni sampalkan, ata	s perhatan i	dan kerja	asamanya, kami ucapkan terima
4 SL	EMAN	ni sampaikan, ata		DIDEV	asamanya, kami ucapkan terima TUR UTAMA DUTA CEMERLANG
4 SL	EMAN n permohonan ini kar		PT.H	DIREK AENA D	TUR UTAMA DUTA CEMERLANG RSITY

## 82 kasus TKI tahun 2016

Comments (confidence of the confidence of the co	Sensitive and information makes to 71 dates. On soil	Noticed targed 11 incomes 1016 hashed date reschool actions flowed incomes about the founds of the first part of the fir	Models and Tractifued for PT Points (Seal Principles), Since Neural discri- fue fitting invested salesty would delinear Inter-A. C. C. T. Scottledge days after 1 leafy indeed delines invested. 2019 (Mg. Seal P. Seal Seal Anneastical services delineare invested, careful research of the delinear 1 leaf of the consistent and the Model Register of the Contract of the Contract Seal Seal Seal Model Refere Integration of the Processes and Seal Seal Seal Seal Model Refere (Mg. Seal Seal Seal Seal Seal Seal Seal Seal	A recent his A stratutes from target document state casts recent in	Princed 2018 for such strong bronders began both attacks and a series when the princed and the series of the serie	invariate fits Am Nobel par Ferris Sample decrease many party stranger 21 personal fits Am Nobel party stranger 21 personal fits fitting to construct the fitting fitting to construct the fitting fitting to construct the fitting fi	Treated in National 2016 Americales in Landsteil in Integral Treated in National 2016.  Strong of the National 2016 Americales in Landsteil in Integral Treated Strong American American American Integration (Same American Strong American Strong American American Integral In
11	911176	MESA	PET CONTRACTOR OF THE CONTRACT	and see a	22.23	443.54	300000000000000000000000000000000000000
11.	Part Contract	boder	Total Control of the	1		1	tentes
man to a temper	toward Cor	Balance and the second	of imper strain for	Print Handage		prospect No. 1 damped completions	and the training
Manus Verina Certa Friest specimens monistic for manages soots a China guid for monitor di contra della	Anthro Section Fronts Ham paper St.  Thermal and section for mater behavior  Whitega delication for mater behavior  Whitega delication and the section of the sec	To Safe the Mont designable	Copy Bible strated teaps date gail is below to profession for more by their control and a designment of leastly in C. 1877, translated gas- ance (and) below disconnections.	10			Annual content and selection float from the content of the content
	Open Assessed	arighment of the second	A 20 100	1		1	the same
1	T. Com.	12 SHILLING TY	Peripusary 1993 1993	120			
	opinster.	Melecon	1	1	1	100	
Approximate Springer	IIC	HATE N	SLAMIC L	Andrew Control	/ERE	IT	and the same of th
11.6	Name of Street	YOO	FYAK	A	R	FA	
		print Cos III.  Section Street	Annual of the control			and 17 agr.	ti mani ti
,		1[	1	-		\$100 M	
Court size for	Total Tages	-	statistics on	Marketon in Pages have Deposite	der beste bei	1 1	
1		1		100	1 1	D 140 16	

	320	D 7 25			11	1 1111111
	colonia fund descentación desta desenta con como desendente como requisidos estata país sources el titulo des funds elemendas estal financia se capita plese servicio el titulo des funds elemendas estal financia capita plese será, lentas	ten-build laurge frameworken Flore four-risk one mean Moste fill for Moste Mostering and Elizabeth which gives some ATMMC day have automotive for the fill for Nove substance four hands frameworken frequents plans and probability.	the changes of the control of a princip control of the changes of the change of the changes of t	Swells from Allerin install yes introduced by the control of persons and persons are a specific former and the persons and the persons are a specific former and a speci	May should use it fair investigate falses success that may been this find one of this place transits place amount account tent in the relevant to the distribute insight spirits and success testions. East information folial distributes insight spirits and success.	where it mention provide a fework (15% cales to the confection states a Country emissable than place (15% cales to the country of the country of the special states along them ethics (15% cales many good Prosin Superings (15% cales) the special collection and the collection was governed (15% cales) the special collection and the states of mentions and allowed provide the special collection and the states of mentions and allowed provide the special collection and the states (15% cales mentions and the states the special collection and the states (15% cales mentions and (15% cales) that seems them the states (15% cales) along the states of the states provided program and the states (15% cales) and the states of the states of mentions and states of the states of the states of states (15% cales) that is a special collection and the states of states (15% cales) and states (15% cal
	111	3 3 3	-	nether .	NOTE:	et unit
	1	-		beden	-	No.
r	*	to an and the same to the same	and the contract of the contra		Asserted Car	and the same of th
r	Annual forces from their control for.  The act states there are it is not state to the state of	technic Secures Prices State numeral DLA x x Shapes at technicists using figuringline secure shalls.	To, i.e., further introduces within displacing the stage mass afficiency dept to be delay family before the stage of the further interpretation of the stage of t	To the finished which the following the finished to the finish	Archer Samuer Present Gam Shupani TSS Ack Annea SSS Stort using dipolongian Samue JANT	and the same projection of
	A STATE OF S	total Sense Fr hase if trabant pera (MFI	of the format spines of the spines spines of the spines spines of the sp	To the property of the second	Annual Services Princes of Services of Ser	and an inches
1	2 2 2		Part of the Control o	100	1	tops as
	1	T SEE		2.3		7000
	Mention	Manusia	7	1	200	al de la constant de
	A table has spen	ob, H. Skille Tesponson souther Estiment	TATE ISLAMIC U	VERS	September 1	Annual transfer of the control of th
	112	S	UNAN KA	LIIA		A
	manufacture (species	Service of Services of Service	YOGYAK	ARI	124	,)
			Complete title			
	Marie Control	Spirite.	i	1		and and
	PT Nashky Sma Sarrama	T Tauly bes. Besiden		1	or Librarian	
	30 fee 16	11.66-10	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	17 Ann 12	27.66.23	23-68
		2	2	а	3	3

	instituti uses etteroristies etn minskillelin kinne trop franciser opsk men och kjohn, kinn kanmenda juda franklike kontre kontre det och trop franciselleline	records 7/1 for, furthering states tempty describe deals of deciries between single 47. (COV) Continues providing the first fields describe helicitation for each plus for investigation providing the first fields describe helicitation for field (FOV) Lincolness for the sound statement data field (EVI) systems field 17. (COV) (Continues for the sound for the field (COV)	reportions found independent of their Apparent also have the independent over physician fraction plans assertion ASTROCO. Sent reteriorated by touch discretion between plans are the telephone plans and telephone.	And the state of t	invasuite higheline bin ummanipus kuningi sampai di supulit bidua di Kurunganisa TI, OAGO kelasa Chitopo Javanegili pada balan kenggi 35 Naturan 2016 dan sank banyar cumbadan kepada pilah biharangi bendasa perior auch renthi	increase that havings for ent of minings promotogy had better from gaining interesting the state of minings and the perfect formation of minings and the perfect formation of the perfect formation	instale 10 na mojela namož filmosti Kakaja instale 10 00 00 literati ili Oliveni Kakaja instale 10 00 00 literati ili Oliveni Kakaja instale i	posago for an Sugaron union named sump data of the laments of the displaced sor displaced of the Publishings Investings, the train flavor's successful training plots inferiors.
		1330	egru	1	Matthe	WATER TO SERVICE OF THE SERVICE OF T	SOUTH	100
	1	1	1	To the state of th	-	2	3	3
	-	the negative formula	apped Cas	and the	grands school utimus	the between the design	Market electric procession percentages invested	natura dilante pirante permitengal tensalit
	Assembly to proof type source to hange their grant to the second to the	Annual transmit fraction grant determines.  Francisco production fraction for the individualism product of determines of the annual fraction of the fraction o	souther Secretar Proper Warm southern 155 An All Carbon March and Charles (Law North) confet Secretar	Andrew harters from their seaton from an assessment from free transfer of harters. An assessment from free free free free free free free fre	Ancho Names (1977) per Internal Angleseys (nexts) fit as Apalent fit antipological primary service (in radial fields	Hoppine Spiriture servicious princia de interiorpe 15 Euro, ant levas de reclaració Cost Mericonal de Euro, ant levas de reclaració Cost Mericonal de Company de porte de la conditionada de la despesa de la company de la conditionada de despesa de la conditionada de la policie. Company de material está de la policie.	Material behavior for the following section of the following section of the following for the following section of the fo	advances of financing as beginning or posterior in movery of a copy global plants (spin town) plants on party global plants (spin town) plants on party spin plants (spin town) arthurphory per party and interpretational move.
	1	1			15	1	Marin	Para de la constitución de la co
	111	12	10-60	17 34A		1		1
	1	and a second	and a	- Company	and loss	Marrie	1	100000
	principal of 1/10 to materials	And samely treppe 41, Management (97), Salamana paraterage.	And the state special state of the state of	TE ISLA	Society can 11 9400 Maggin Class Immediage	Sea Aspertus Sections	Santa	Agreement of the control of the cont
	-31	1		NAN	I K	Again San	IA	A
	Spires Spires	and the same of th	M	didil	A	KA I	RIT	A
			artes.	SIA		1		1
	AT Day Yaped	Age Support	PT Scattly See Serioris	Properties	Section to seed on	e 200s especiales	Name of Street	Mare 2010
	23-346-18	Mark 18	35.66-18	35-146-35	28.646	II Ol Mare	22 23 May 1	15
1	2	2	#	=	8			

the control of the co	The control of the co	Association than the expensional states to convey on the light and the state of the convey of the co	cations in an electrometrial subtle different teaching print and control of the c	interpretation of the control of the	invasurity in the standard controlled interesting an extrement of the standard production and the standard and standard interesting in the standard production and the standard	Account Net per Salament respect to foods and a count in the series of screening leads part or series (a series) and a series	Associated social extension that State Secured Assistant production for the Associated Secure Consequence Secure S
	American Chapterin Cyclestral Cyc	13	1	1111	HILLS	regress	SECTION .
	activity.	MATERIAL STATES	-	TY MANY I	3	3	To the
	to the control of the	Appropriate Control Color	Annual property from		annua haras di randi dala di Di Putring tai Yel Yeng Edi Chara lare Yengih	mental backs in the first state of comments of the first state of comments of the first state of the first s	Statement for prosts than statement
	Action to the country of the country		-	Adoption and property of the control	Addison having the first production and requiring in section 16 or Sacha And towarding disease the results and section of section belongs the foreign of trans and Chains inner Frequent	skelour kanton fanito pera kelouster in septimente jouant 10 in Selent travité à remengal dessi destructurant Necota esse d' mémbra de la principal service service dessi de Comme N. Il (del familiar general state de les hegits)	of Adult Setting grout Sam Assess Personal Setting To at, the Internet
11	li	Age of the same of	-	2	13	11	-
		101	1	Banks Sandar	10	1	2000 September 1
	100	- Daniel	Nationals.	to de la constante de la const	- Makera	assessed in the latest and the lates	1
	SIJI	A Comment of the Comm	SLA		SITY	Colleges Col	property of 1004 forest Coap Sales and length
	Y		1	Management of the control of the con	A	Septem Se	Married Married and Married an
	report (M.1) was record (M.1) was record (M.1) record (M.1) record (M.1) record (M.1) record (M.1) record (M.1)	E Suprael States the R. I. Sammelon Prognatives regulator	1. Inglandation In In I Inglandation In Inches Inglandation Inches Inche	Tang bad jalangan ang ang ang ang ang ang ang ang an	No. of size Tel. and Cabes Serv.	to 15 sterior for the transfer of the Sterior	A. Santago - In- no. 13 satura datas hawa in-
	1	No.	1	100	1 10	1	10
	spill lawfor bet Superari	Time Vigor	Character Spirit	Touchy period speciety i	200	200 Yadio Larmon	Page 1
	1 1	1	1 1	15.3 15.3 16.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18	1 2 2	The state of the s	
	E R	2	2	n n	*	2	2

Security from a particular speciment and the security of the s	on a spranker, and extraction depends the proteins that a sub-intermed proteins.  The country depends the first intermediate from the proteins of the sub-intermediate from th	Assessed to further estimated that beared will fit as, that if as an interest in the extent of the second for t	Process, To as Principle Sec States States States Income delta path serging \$17 April 2016 date which the form of	The characters had necline roughlishing and progged of west 2016. Just inclusion and medican roughlishings to be progged of west 2016. Just inclusion species and the characters are also and the characters are also and the an thread inspect apids in serious in, 6000 CGO, due Prant present by the related and the characters are also and the characters of the characters of the characters are also 2016.	Membership and relative to the manual bills TS or Addition follows. On that relative that assembly than assembly the follow filterfluor legants shift and privile.	Moneypulida, but intermediate false bounts 15 safe et., no Numerage). One four intermediate false source() safe fields. Stonikas kepata pilat yang tehali	Assessment of the Teach of the Control of the Contr	Julia Francis Cler Sons retomorbas Stum zamanis foreidana faria Julia diberitari kepala pihak sang intiasi	Internative surpresentes the excess TO Sell as De- Princeau. De Sell articles elementes the appeal pilot fade their femals plut and terfal.	Accelerator for standardisch Nave gestem 181 delli av You's Der You's relevandage stand mentred beld Made dijection begals glob verg strake.
1	3	2000	and	Michie	No.	NI III	A 018		STILL	NOTE:
1	1	1	3	T-Color	Sunday	heden	1		No.	Nov.
The second second	age property constitution of the constitution	Schmedick prost Com. It	innize proper drowing this is typing if Opplies on George Late, It is becomes loss Trapis	man a began autor esp	5 4	Surface Proper Close Assertes	Sentent Protes (San Salaris)	Secure from the factor of the	Santan Proc. Com.	Eastern Com.
Transmission of the control of the c	even of the development of the control of the contr	Andree Lewisser proper Union managed the Re- busings Chen by Emerica Relations fits an Anti-Personali	Marken farman familian protificiporate kepulangan jerapah Ni an Polamid dan Rewall samual demand daka	In al, touch superings spokesplan.	Andrew Names Present State Statement Title Could American Cheeck the Forestern Militarytish. Too per, Ademicko Robjech.	focuse bemaje them assembly TS take we the technologish	Natura Sambain Process Stam Standards Sambains Voolg, Open Say Process Millegold. This an Enganuel Hastifelds.	Autoria hamasa Nam karanda kecidasa kerja Yiti an Sidik Pesatrina	Multiple Sections from secretary Tio Seld as. Our Intercepts	takes lastes from time hower transcripts over up from Migrie list at the
11 11 3 3	Age Sensit		100 miles	Double (Fam.		Saint	â	teritation total	150	
	Andrew College of the	Titles (miles	23	PF Salars To	Friday.	1 1 1 1	Angeria	Date of the last o	2	200
1	1	1	note.	3	2 4 4 4	223	1	a de la composition della comp	7	1
Frage of Little Value forms	ton and year contains and year of the contains and the co	Series B. Bougo, Sea solver barred Physiciate	Spang RT (Spiglaton, Salang Na- ser Cali Emparted Inco Implif	the special Serging Sterner of	Tegamule RT, OACHE Assembler Delanger Vitates Jees Tength	Bubutan M. Dajiti Puncacial Paradisp Java Yangal	Sarapeta ine hegs	Sequest 81 Of Semanth to playe family Diff	Angues II (10%) Staneous Novegii nee Ingel	of the to st. of separation for the state of
Provide Sales, or Fig. 5140	SI SI	JAN J	SLA STREET	MIC KA	Marsan Trinch	VER	Appendix attraction	July 1-1900 4502333	See ATTAGG	race attestory
Appropriate State	A (Colored on AST) or (Col	Confidence No. 21 Constitution of 21 Colors After Services Colors After Services Frequent		And Stronger F. (11.73)  Augment 197  Augmen	C. Charage Selver Science bette Sense St.	A Constitut 27	1 Van Topicheller	25. In flower map Sent for Lite allocate Sent and Special Sent and Special Sent and	and frequent of field place because winners has being	A family before the 1347 state from spares trains and hope
	2	M.		And April	1	2	E	M	N S	1
Section allows	day written i extra	Ff Salary Facinity Corporation	Age had been	Martinion	PT Mangal Anagers properties and	PT Consultation Williams	Tibels ough	Pf Special Des	No.	1
State II	10 Apr 10	10 mary 10 mar	Stage St	Based	01 the 20st	- 100 see 100 g	\$0.00 Med 2008	SECUL MAIN SE	Street Man	
1	2	12	21	2	=	21	0	2	2	

	A strenge of as Tanibus very of services great interactions beginnings.  Assisted to the services controlled to the services of the services controlled of the services of the	Intersection Charles on a PT Action Proplication Dates, Date Issued desti- tional handless and the Action of Action Proplication Dates also mergonal-distan- mental reproduces TO Chemics 4(4) Proplems.  To an Chemical Proplems are the Action of Proplems and Language 2(4) Action 2006. Chemical reviews are the Action of Action of Proplems and Action of Action Chemical Proplems are all their bows smooth date bloop standards.	A "Advantage containing in the Vigin Contain of the designation of containing and containing the containing of the conta	interpretate in terminal for 7T disigns Puris shareful- mated for tabilities seem shareful fish emerged in order FT floats forgate mentility, the Plant AT floats forms between relative relative share mentility great-ring black proper liquids and between glasten.	skeinkalan fürstaay ke PT füngen Purina kkauden. mind ib de killeda benet biskein Villeda kerkein. Projekt om erkein, den Pinka Projekt biskein VIII bevergelte mentekki PT Projekt füngen verwellen, den Pinka PT Engelt Persik Mendelt katenpataan tilda dake menmets gibni ingi finan projekt finanka projekt biskein gebessegkeinen.	**Advention from the same of pervision gave between the hydrogen TXI and the same statements and the same statement of the same stat
1	SUCCE	William William	NIES	400	SIGN	THE REAL PROPERTY.
	1	596	Desites.	Parties .	Medica	2
41.00	Fullin to Court advances in fraction from the court of the foresteen	haper with devingtors due justin date date deventualen.	and suffer	division of the Tymester good rug fries Proess.	Obstanciae das Pestadas gant rag biega frema FT Futra Bragas Mandisi.	Forties Goes false as a statement of stateme
The activities of the second	Andrew benear feliatory guide statestran for the property of the property of the feliatory fermings faired secretarists and regularisation of financial fairst Statestran 27, 518 Eulis Responges (predictings).	To an Orman Aprillation months deputinglian transport between sold the perceivant Mata transport design of the perceivant Mata transport design of the perceivant from the perceivant of the freshibition of their serial discentishing.	A formal place of the place of	Tit ja Tipusi jaling ku vistoolee dagareeksi Pecinjan kali jassi linteger P., de skeep meemines pamisi Agni liingkang 1900 ml	To an Equipo pareng on materials and despect of the control of the	Nation (special lightly policy) to be supposed to b
	11	t mets polesylae	and	Maria	Section 18	No. of Street, or other Persons
11	1 1	Tri sales frequencial de Soles	D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	A Marie Ser	2 2 2 2	12
	an September 1	Constant	5.73	200	1	***************************************
	Sections of 10 feet, for feet, for feet, f	Male (E) Male Shower Cir.	Common III - 1707 Strate - 144 Forgett	And Angelon Const. 17(2) and the constitution of the const	A Trapitore II on 27 hours	Application IV (2)(7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
anna a	Noneco .	STATE IS	AMIC UNIV	FRSITY	Delities.	
	, SI	INA	NKAII	IAC		*
A COLUMN TO A COLU	Constitution or an area of a second or a s	WO G	NAKAI	NIT A	Forgetien (5 m.) Searchast 1 Sept Research Free Repends (res Repends (res Freego	200 inter to have 2000 to 1000
1	1 3 3 5	And age	in property of the property of	So see	hant ()).	
1	1					-
1	1 1	Comments of the Paragraph of the Paragra	Mai Policie	1	Topic Topic	
1000	3 May 2018	11 tee-201	10 000 M	17 ade 17	171te J	2000
		4	9	2	8	-

control of the contro	TYTE STATES THE STATES OF THE STATES OF CHARACTERS AND THE STATES OF THE	interpretation states that the past calcare benefit should start towerful admits the case what interfaces depart departs depart departs the past to be set in the case of the	action is seen as to find the second point of the second control o	Appropriates deposite to an Tip dies company desent Accesso des formation in transfers autoria vision des sints tendence danné facenti di service Angues perogenitates services PT DAS. Das Bockes TIBS notate standel.	And the second section is a first first through the second section in the second section is and the second section is and the second section is section to the second section in the second section is section to the second section in the second section is section to the second section in the second section section is section to the second section sec	relation to statistica or or Toper Virgor Freigns (for the later Rippersording and received parties (segged 12 bid 2012 Area for the restrict may be clim to respect that the relation of their Coper Project and sink, Coping their resequenches follow account (staff, Cope segisting conversit investigate) (ser make nine fibrations topical. To an Surgeon Assertion match Speciation to parts and persistent topics.)
111	WEST TO THE PERSON OF THE PERS	953102	active	Parties and the second	MIN	NOTE:
	Berthal	-			Partie	beden
	0) julies 1 (elem fair book filterin perchi.	to a section	Stranger on technique	custo (par esta resistente tra perenter	Mary Ann Alba Selberan Mary Sembels	from prost bits detendantes
And the latest of the latest o	15 an Separata totale status tener en velenna 2 (s) school: Tenega paji poleme 2 sekuri terriebosi. Te terlemi diteajankan.	Tit as in high-lish sodie helis teasted in source as assume 2 states, also remayented perform the recognish performed to the performance of the source and t	Tit jan. Jan. Cho Rgang sastah Makin keneriah salaming Saban, Jahan sanggarili jammaran secarah Salami dan dalah Makin Salami salami seri Chot dalaming Jahar Makin Salami salami seri 195 salah makai Chot Villi memerintah bantam- maniah managai Salami dan disan bahdalam seriahda.	THE ALL THE CITYS I STEM SHARES AND A STEM OF THE ALL	This see are Dead Sufficies multith halfith Noveley- andering 2 (storing, what recognition of professor of the recognition from this larger desirable to DOV colouring Search's year, general-range Strategies of THIS seeks interest the Noveley Searcherson-Quickless- THIS seeks interest to the Mills of the Mills and American entitle mentalist lighted files where Services and	TO an function than belongs admin 11 had been been stated and for the control of
	Copy letter	Separate Person	Spirite PFFIS	desker sytut	Columns crahar PPTUS	
	PT. Securities Politics Indicates Soldies Soldies	PT CASE Spectral Springs Springs	PT Daily Serviced Serviced	PITDON Paradi Original Springs	Salar	PT Date Springs Springs Springs
	¥	, market	Parameter A	entre en	Manual	The same of the sa
Systematic representations of the same foreigner.	682	95 D D	238	V A H H	T September 1	Special property and property a
	100	INA	ствани	ALI	AC	iA_
		YOC	YA	KAR	IT/	4
	Papere (f. 8,01). Displayed in the first paper (f. 8,01). Displayed these beautiful these beautiful these beautiful these beautiful the first paper.	Cabinista Fajin Sentingust Papegor Renta (DF	Nicipe Physics Nicipe Physics Barbary/Dest Narial DV	Conjugació (N. 1991) (O. Cartingari Sandon) Ramori (O.)	Napalang De St. Colon Colempiests Sandam Rambal Del	Newton 157 (NOT) Superior 157 (NOT) Lake Prop 27
	And the same	for any berranghatan	See O.	appropriate of the column colu	Total and the second	Protection and Protec
		500	Native as	St Frances	and the same	and the same of th
	100 mg	1 1 1 1 1 1	THE SECOND	ST.	1000 211	23 her 2014
	2	3	S.	3	2	2

To the TOTAL POST Prosperious districtions on the constitution of	If you was a second to the contraction of the contr	* Angeles   Langgo 21 Lin 2015 Stellen merethaniliter  * Angeles   Transpire   Transpire   Perpetua perginal personal Config.  * Orange 21 Conference atoms   Income and Recording Of the United Data    * Transpire   Transpire atoms   Income and Recording Action    * Transpire   Transpire atoms   Transpire atoms    * Transpire atoms   Transpire atoms   Transpire    * Transpire atoms   Transpire atoms   Transpire    * Transpire atoms   Transpire atoms   Transpire    * Transpire atoms   Transpire atoms   Transpire atoms    * Transpire atoms   Transpire atoms    * Transpire atoms   Transpire atoms    * Transpire atoms    * Transpire atoms   Transpire atoms    * Transpire atoms	- Saddon I vergue 11 bel 2015 makes wengkasilikan kerapasan, PT Dan Yope Persons song divabili Oleh H. Empay, M. (Senster sonn) I moch also medakatan Berdham er von Sam Per Differ.  "modes of this son in an elistometer pole 12 Aprilio 2016 "modes of planters may diskonsiste pole 12 Aprilio 2016 Vandon media ika handah 27 Sper Montal Berthers antibe
100	1	NE STATE OF	SAING SALESA
		COMPANY CONTRACTOR	an site an site attent 2.5 fempat
	the second of th	Great registered states of development of the year development of the year states it among the received of the year properties to the year of the year	Guid rug deeds prised. Greet partiel dan lob barrank berja judama 2 S sahan Sersual deegel. projecjan kerja
Commence of the second se	Till per ha a suscenting behaviog still year old vigetimes a state of the common table	of an Scool project for being the second	161 pr. Southern objektingtein for measures is being street distinctives output for forms distinctives majous autonom measures program to the fact along
	151 Substitute (150 miles) Substitute (150 miles) Substitute (150 miles) Substitute (150 miles) Substitute (150 miles)	1	1
	T Balance Order	P. Doe	1 1 1 1
	F 2 00	Indexes	Special Control
	When RT (E) Strenger is been DVY	American Statement of Statement	17/12 It may be not 17/17.
	STATE ISLAMIC	CUNIVERSITY	added/1
district seed on the seed of t	ONAN N		See Spring See See See See See See See See See Se
	of Period States	ppglanusia National	Maria .
	3	2	1
	1	2	1

The second control of the control of	Associated to the second of th	reprintment is INVITE mark.	gents 11 kag (2016 Melatokan interferents for 17 kattu- vereinterent (2016 Melatokan interferents for 17 kattu- vereinterents (2016 Melatokan interferents (2016 Meratokan)  and dere Nachtage to 17 kattu-fereinterents (2016 Meratokan)  and dere Nachtage to 17 kattu-fereinterents (2016 Melatokan)  and dere Nachtage von der 155 deservat volum interverigier (2016 Melatokan)  and dere Nachtage von dere 155 deservat volum interverigier (2016 Melatokan  and Statisch fact region to Melatokan  Angel Sandan fact region to Melatok	manuface blasm statement Print Treatment Print	Metalist beinge forward date pale regge 75 kpctor. This day being forward beingstate beaute pink betargo, breers therefore using sortenes where for 2.500 for date 86 fts. registerite.	control of the Park of the Same
The second secon	Talk Poul Ariengo mary remay private day septimal surfamentical dengar VS.	Desputato to SRP 21st desput	** - early 11 kmg 2018 Medicinate stilled Pre-plane in the calmed Verginders ** raugh early sharfless to 47 killish freqs pre-plane 30 kmg 10 kmg	Membershar suret mine		State of spring
111111111111111111111111111111111111111	3	95.7	and the same of th	PO COLOR	PER STATE OF THE S	
	1	hader .	5	Per Control	3	
-	ample of the control	As speed Service.	Sectoral Francists Sectoral Fran	The second secon	Vertical beneal feeling part elements of legisleppe lening filt or frage same director talls.	series to de justi, Na territorio de 1916, signi dismissible.
	And the state of the metal of the state of t	Til Jan, weitige builden versighted. Fraktischer Frameng dersyns weitheit mit 97/27/1128/GM. Falle versight den Januarien preist bengger 30 meter 2013 o	The state of the s	To as And And Annual Department of Plant and Andrews as included in the specific days before making of dates specific total ada perhapisan lagi di Samuria.	Tit, as fishes menugal during it forting it fraggering disservation tenderates.	The participal sequence common delicates for the participal sequence of the
	and	The state of the s	1	1	Attended to the state of the st	Service Services
111	1	0.0	Total Parish	1	1	2700
111	Antiques and an	1 to 1	1 2 3	1	e and display	
Andrew Street Street	the state of the s	themselve vir et 5272	Market St. Gliss Corpus Street Street Corpus Street	www.min.min.min.min.min.min.min.min.min.min	Selected of SMI	A tops letters A spide A spide a suppare head to
S	IIN	4	I KA	IIA		
	NO.	*	1	A R T	JA.	1
without which we will be a series of the ser	And September (1964)	Museyan VII et 01/23 Toharjo Slemat DV	Agency II. 0236 Right formega Con-line formega Files Agents for Trepts	Personal III (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Ingene lette.	1
	In code	temberser hast (s)	rondoming heat ().	Tit sang bersangkata n		Name of the last
	No farment	-	Supplement Pageston	Ann half Agent	energy tip	
	II state of	Stragen II		H April H	M. Appell M.	
	3	2	3		3	

Secretary of the property of t	demineration surse reformenders blains pourant Units begands	Management of the technologies from statement on the technology of the statement of the sta	Identification, turns or enconcentral Main popured Use Tic Amphilia Place yeng before.	Journal of the Common of the C	Microbial and interesting interest 10 Units on Angle and Interest, dan surer recommender under direction legals shift york (serket.	Mannya, Antonessa dan'i Ne gai pada distributi soletani 30 Julia.  dan suama matah dan distribution bersanda apin yang di Malayani bersanda apin yang di Malayani bersanda apin yang di Malayani bersanda matah satema pada wakit buli pudang be indonessa 155 sodah distribution sepirahik sang distribution sepirahik se	Nemperium sora rekomentara annuani Yil Salat an Ani Falim Museusuhi, dan lui at rekomendasi sudah diberikan kesada soban sang tarkait.	Cipinouchan medicis tanggal (1): 11-2016.  Spinouchan process tanggal (1): 11-2016.  Switching by the second process tanggal (1): 12016.  Switching by the second process tanggal in the second process tanggal to tanggal the second process tanggal to tanggal the second process tanggal to the second process tanggal
	N ISSE	30	enthe.	NO COM	and the same of th	530054	NO.	KIISN
	N Samo	I	3	2000		1	1	Total and the second se
	Makes bartare Popels to Chain Assertmed Till tim Re.	Makes Asserted THS Unifit.	Mater Asserted To De-fit.	Makon barnah Prosts Maim Augrens TXC Unit Re	district Sisterates in cardials	Cult support	Restand Brus segera di Cartain	Octomen biss regins in vernitabilitats
The control of the co		IS an. Sola Visiquem di Pubreghan Ne nsporezia di Azemskan medical Umille. M onema Melitrjila.	N an Sapkanto di Pulangkan ter Adonesia dharendan medical Undit onema Malepila.	Try an, Sto Norpous Dox, of Pulseegism Ne indomenia dilaterakan medical Units Forema Indepris	II av. Joggrenn funtanti doplatigkan er historesia dikarevatan Unfti, dan Mohan bantaan untuk protes Maim esarkeni TRI Unfti.	Tid an. En Annin sychin dus serengah danus belega di Makaynis Guji selema danus belega di Makaynis Guji selema dagen di Malaynis Annung seba sentua dil peta.	TO as Ass Faths Mayarjamah dioulangs an ke Indoorsis disamentan Sant, dan PS TSG Mangajahan permetenan bantuan propes Maint esurani salah	Tot an, Mile Bas Solitistimo sudate.  Manualizari del Basilia esta personalizari sutura dispensionalizari sutura departura Cara dispensionalizari sutura departura basilia mala villa controlo dispensionalizari del Basilia mala villa del Basilia de
	8	2			-	Gal North	7850	Obliger Grands Prints
	5	To the same of the	PT Salast Undit	-	3	33	200	PT ESS. Double Projector Coulor South Coulor Paper and 3
	2 2 2 3	1011	1 5 5	1 0 3 %	2	1	1	7
	Sammalyer Dukayi San KT. Ma Oskipti Pulmatenja Sensi Tengah	Furnisher IT Or Scheduler Funding Lenio Ort	Seminary St. (2012) Seminary S	factorial, demograf. Proceeds, Astal. Astronopol. Astronopol. Proceeds. Horonopol.	Versida II. (MIII. Versida Meditio Legerges See Teight	And State of Control o	Anticophone P. 13700 Company of the	Tagai dengua hii 13,0% kii saada kanan kinnan kinna
	(cacas)	IS7		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	40/1	C UNIN	ERSI	
	Na Zonfa						JA	HA
	S, Competito 27. Il	A Transmission of the Control of the	A. The pattern hart of Tables or Oak to 10 by	Service of the servic		I A	Day	Top Coops II is Top Coops II is top and Soles and Soles II
	rottes		100,000			1		To and the second secon
	II of carpings wine high	North spieles spieces 14	P. Salve Garde	PT Exhibition shing Notes	Audio agents remarks (3)	to dans	or age thank	Me ha jaken
	27 Appet 28	25 359 35	20 000	14 540 14	26.000.25	11.000.11	25-08-18	NOS II
	=	2	2	z	E	*	E	R

The state of the s	The control of the co	Additional or medical public sunggal (A Countries viola Medical addition) debt 264, Schamma action to the sunger of Cott cab.  registration debt 264, Schamma action (PT Cott cab.  registration debt medical, Protegos (PT OT OT Cott cab.  registration debt (PT Cott cab.) desired deriversity and protection of the protec	Squarte as so still found Derestatem/peopleton modifiedship protect frompletaten)	292032002
A CONTRACTOR CONTRACTO	113.11	301150	28 PROSES	
The state of the s	The same of the sa	Miles		Penang Dy NP 23
The state of the s	more than the control of the control	Memoria Dalamen Memoria Dalamen (924) soil depit seger. Generibilitas targa hirot membray lista targa hirot membray lista badah 121 an. Ari Riandris.	Pitus Lebanga meminta hantum untuk memintangan TSI an Sumangat dalam kendisi apapun.	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	1 3 4	To an An Tainton Gagai percengalan an riginangan hi kindinnasa an riginangan hi kindinnasa persatan Bi Seampainta di Indonesia To an Aberinas manga deformer Separan gran PT EVX merahamya dengan alasan Harar menganti dala bisya posjam sang bebant deba bisya posjam sang bebant dela bisya	To an Sumaryal Sain dan setaing, breaza a kCV Rear Hespall of negara. Bruna dinushalam.	
PARTITION OF THE PARTIT	1	personal per	Forum dan Spullingse	1
The state of the s		1		
Signature of the state of the s	and the second s	No. of Contrast	Burnai	
Station of the state of the sta	Spinore of Standards on Standar	to 22.9 COlecto a Tempe a Tempe	23/25 10/21/03	IC UNIVERSITY
Appropriate to the state of the		SUNA	New York	KALIJAGA
Appropriate to the state of the	1	YOG	1	KARTA
	Appendix of the Control of the Contr	Total States		
	-		No. of London	
Township (1915) at the second	And the same of th	Becoment (ALEXE	Semanage	
23 Dec 2016	100 to 10	09 Det 2018	25 Des 2016	

## **CURRICULUM VITAE**

## **Data Pribadi**

Nama : Siti Anisa

Tempat, tanggal lahir: OKU Timur, 20 Juli 1994

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat asal : Batumarta VII Blok B Rt/Rw 001/002 Desa Wanabakti

Kec. Madang Suku III Kab. Ogan Komering Ulu Timur

Sumatera Selatan

Alamat di Yogyakarta: Gang Ori 1 No 17G Papringan, Depok, Sleman, Yogyakarta,

DIY

Email : annisa.sungkowo@gmail.com

## LatarBelakangPendidikan

Formal

2000-2006 : SDN 1 Batumarta VII Blok A

2006-2009 : MTsN Babakan Ciwaringin Cirebon, Jawa Barat

2009-2012 : Man Model Babakan Ciwaringin Cirebon, Jawa Barat

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarny, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Siti Anisa